

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. Yaitu pihak Kepolisian yang seharusnya menjadi pelaksana utama dalam menyampaikan, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban izin sebelum menggunakan jalan umum untuk kegiatan hajatan, belum melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, selain itu, selama ini masyarakat hanya meminta izin secara lisan kepada Kepala Desa tanpa mengurus izin resmi ke pihak kepolisian maupun rekomendasi teknis kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan antara kepolisian, pemerintah Desa, dan masyarakat belum berjalan dengan baik.
2. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pada Pendirian Tenda Hajatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur. *Siyasah Tanfidziyah* menekankan bahwa setiap aturan yang telah disusun oleh penguasa atau pemimpin wajib dilaksanakan dengan baik untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat (*maṣlahat al-mujtama*), namun dalam

3. kenyataannya, aturan mengenai penggunaan jalan umum selain untuk kegiatan lalu lintas tidak dijalankan secara tegas dan konsisten, Dengan demikian, dari sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah*, implementasi Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas pada pendirian tenda hajatan di Desa Pinang Jawa II, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, belum memenuhi prinsip pelaksanaan hukum yang seharusnya, karena aturan tidak dijalankan secara efektif, pengawasan lemah, dan masyarakat tidak memperoleh edukasi yang memadai mengenai aturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan masyarakat belum tercapai sebagaimana tuntunan *Siyasah Tanfidziyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan dari proses yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Kepada Aparat Desa, Kepolisian dan Dinas Perhubungan diharapkan meningkatkan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat Desa tentang pentingnya izin tenda hajatan dan prosedur yang benar, serta melakukan pengawasan bersama untuk mencegah penyalahgunaan jalan umum.
2. Kepada Masyarakat: saat menyelenggarakan hajatan diharapkan meningkatkan kesadaran hukum, agar mengurus permohonan izin secara resmi agar kegiatan hajatan tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
3. Kepada Peliti Selanjutnya: Agar lebih mengkaji dengan Metode berbeda, (Misalnya pendekatan Kuantitatif atau Komparatif di Desa lain).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ainiyah, Qurrotul, Noor Fatika, dan Eka Yuyun Faris Daniyati.” *Konsep Implementasi Pemelajaran Tafsir Amaly dan Kaitannya dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih.*” Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1 Maret 2022.
- Pratama Rani Ananda, Mani Festati Broto dan Razaki Persada.”*Implementasi Program Kerja Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna,*” Jurnal Ilmiah Indonesia, 6 Juni 2022.
- Rorin, Andreas Delpiero, Michael S. Mantri, dan Marlen T. Lopian. *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Coved 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.*”Jurnal Governance, 2021.
- Suryana Dian dan Chadijah Rizki Lestari.” *Pengunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.*”Jurnal Ilmia Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 4 November 2018.

Buku Dan Skripsi

- Andika Trio Hasyim. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Menurut Perspektif Siyasah Tandfidziyah, (Studi di Desa Tanggulangin Kabupaten Lampung Tengah.*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: skripsi Sarjana, Fakultas Syariah,2023.
- Febryan Rosi Ade. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, 2022.
- Habib, *“Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa*

- Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah 2022.
- Ousairy Ilham. ‘‘ Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara(Studi Khusus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya),’’Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum,2023
- Riski, ‘‘*Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.’’ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah,2022.
- Septiani, Argi. ‘‘*Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Tanfidziyah.*’’ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. 2022.
- Suriyana, ‘‘*Ektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Penutupan Jalan Dalam Kegiatan Pesta Di Kabupaten Pinrang.*’’ Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Syarifuddin Amir, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Woodya Ridha Ferizal, ‘‘ Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah).’’ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum,2022.

Internet

- Badriyah Siti. Implementasi: *Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya*, dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, pada hari Senin 20 April 2025, Pukul 16.37 WIB.

Undang-undang

- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 17 Ayat 1-3
- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 15 ayat 3
- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 1 Angka 9
- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Pasal 16 ayat 2
- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 1 ayat 12
- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 1 ayat 2
- Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 14 ayat 1-5